

---

---

## REPRESENTASI KORUPSI DALAM NOVEL-NOVEL INDONESIA ERA REFORMASI

**Kasmuri**

SDN Pangkatrejo 1, Kec. Lamongan, Kab. Lamongan

Telp. 085232753677

Pos-el: [so\\_gold13@yahoo.co.id](mailto:so_gold13@yahoo.co.id)

**Abstrak:** Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan representasi korupsi dalam novel-novel Indonesia era reformasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data penelitian ini adalah berupa frase, kalimat, paragraf dalam novel 86 karya Okky Madasari dan novel *Slank 5 Hero* dari Atlantiskarya Sukardi Rinakit. Teknik pengumpulan data meliputi teknik dokumentasi, simak, dan catat. Teknik analisis data menggunakan langkah-langkah: membaca novel, mengambil data, menganalisis data, menyimpulkan, dan menyusun laporan. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam novel 86 dan novel *Slank 5 Hero* dari Atlantis terdapat bentuk-bentuk korupsi meliputi suap menyuap, pemerasan, dan perbuatan curang. Faktor penyebab korupsi meliputi faktor internal dan faktor eksternal.

**Kata kunci:** korupsi, suap, pemerasan, curang

**Abstract:** The purpose of this study is to describe the representation of corruption in Indonesian novels of reform era. This study used descriptive qualitative method. This research data is in the form of phrase, sentence, paragraph in novel 86 works of Okky Madasari and novel *Slank 5 Hero* from Atlantis by Sukardi Rinakit. Data collection techniques include documentation techniques, refer to, and record. Data analysis techniques use these steps: reading novels, taking data, analyzing data, summarizing, and compiling reports. The results of this study can be concluded that in novel 86 and novel *Slank 5 Hero* from Atlantis there are forms of corruption include bribe bribery, extortion, and cheating. Factors causing corruption include internal factors and external factors.

**Keywords:** corruption, kickbacks, extortion, cheating

### PENDAHULUAN

Korupsi di Indonesia sudah merupakan *endemic*, *sistemic*, dan *widespread*. Korupsi bahkan sudah merampas hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (ekosob) masyarakat banyak, sehingga harus diberantas. Korupsi merupakan kejahatan yang sulit dicari penjahatnya (*crime without offenders*),

karena korupsi berada pada wilayah yang sulit untuk ditembus. Korupsi dikatakan sebagai *invisible crime* yang sangat sulit memperoleh prosedural pembuktiannya, di mana modus operandinya bersifat sistematis dan berjemaah (Rukmini, 2009:2).

Kondisi yang sangat memprihatinkan ini, penyelesaiannya

harus disertai dengan perubahan perilaku dan budaya manusia Indonesia secara *komprehensif* dan dalam waktu yang lama. Ini berarti, selain sistem, sarana, dan prasarana, lembaga-lembaga khusus seperti KPKPN, BPK, KPTPK (Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) yang baru saja terbentuk mempunyai peran yang sangat strategis dalam pemberantasan korupsi tersebut (Nubowo, 2004:15).

Berkaitan dengan hal-hal di atas, sastra yang baik adalah sastra yang dapat membawa pencerahan bagi pembacanya. Sastra yang baik pun seharusnya bertugas memberi wawasan segar dan pencerahan kreatif kepada publik luas agar terhindar dari berbagai tindak kejahatan, terutama tindak korupsi. Karya sastra yang bertema korupsi, seperti dikatakan oleh Sarjono (2012:2) sangat sedikit. Dikatakan lebih lanjut (2012:8) bahwa selain miskinnya tema korupsi dalam sastra Indonesia, penelitian, pembahasan, bahkan pembicaraan mengenai tema korupsi dalam sastra jauh lebih sedikit lagi.

Huda Sudjiman (1998:53) mengatakan bahwa novel adalah prosa rekaan yang menyuguhkan tokoh dan menampilkan serangkaian peristiwa serta latar secara tersusun. Batos (dalam Tarigan, 1995:164) menyatakan bahwa novel merupakan sebuah roman, pelaku-pelaku mulai dengan waktu muda, menjadi tua, bergerak dari sebuah adegan yang lain dari suatu tempat ke tempat yang lain.

Korupsi didefinisikan sebagai menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara (Kartono, 1991:80). Jeremy Pope mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau kepercayaan untuk kepentingan pribadi (Pope, 2003:6). Transparansi Internasional mendefinisikan korupsi

sebagai “*the abuse of entrusted power for private gain*,” penyalahgunaan amanah yang dipercayakan untuk mendapatkan keuntungan pribadi (Wijayanto, 2009:6-7).

Terdapat beragam bentuk korupsi. Menurut 13 pasal dalam UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, terdapat tujuh jenis atau bentuk korupsi, yaitu 1) kerugian keuangan negara, 2) suap-menyuap, 3) penggelapan dalam jabatan, 4) pemerasan, 5) perbuatan curang, 6) benturan kepentingan dalam pengadaan, dan 7) gratifikasi (KPK, 2006:128).

Korupsi muncul karena adanya keinginan dan kesempatan (*willingness and opportunity*) yang terjadi secara bersamaan. Keinginan untuk korupsi bersifat internal tetapi bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, sedangkan kesempatan bersifat eksternal (Wijayanto, 2009:26).

Menurut Salama (2010:83—95) faktor internal penyebab korupsi adalah 1) aspek individu pelaku korupsi, dan 2) aspek sosial. Sedangkan faktor eksternal penyebab korupsi adalah 1) sikap masyarakat terhadap korupsi, 2) aspek ekonomi, 3) aspek politik, 4) aspek hukum, dan 5) aspek organisasi.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif disusun dalam bentuk narasi yang bersifat kreatif dan mendalam serta menunjukkan ciri-ciri alamiahnya (Siswanto, 2005:57).

Data dan sumber data dalam penelitian ini adalah frasa, kalimat, paragraf dalam novel “86” karya Okky Madasari dan novel *Slank 5 Hero dari Atlantis* karya Sukardi Rinakit yang berisi tentang representasi korupsi pada era reformasi.

Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah 1) teknik dokumentasi, 2) teknik simak, dan 3) teknik catat. Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri dan lembar korpus data.

Teknik analisis data penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif. Menurut Milles dan Hubberman dalam Ratna (2010:309—311), teknik analisis kualitatif dimulai dengan mengumpulkan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Suap Menyuaup

Praktik suap menyuaup sudah menjadi kebiasaan yang lumrah. Khususnya dalam institusi pelayanan yang berkaitan dengan publik. Memberikan uang atau barang dalam rangka mempercepat proses yang berkaitan dengan birokrasi.

Praktik korupsi suap menyuaup dengan menggunakan sandi "delapan enam" di pengadilan bisa dilakukan siapa saja, mulai dari seorang pegawai rendah yang tugasnya mengetik keputusan pengadilan, panitera, pengacara, jaksa, hingga hakim. Mereka saling bekerja sama untuk menyelesaikan kasus pengadilan secara cepat, dengan menggunakan cara "sogokan". Praktik suap menyuaup antara juru ketik pengadilan, panitera, pengacara, jaksa, dan hakim. Uang yang mereka peroleh dari praktik suap menyuaup jumlahnya lebih tinggi daripada gajinya. Tidak mengherankan jika mereka bisa membeli barang-barang yang tak mungkin terbeli jika mengandalkan gaji negara semata. Mereka bisa membeli mobil dan rumah mewah, berlibur ke tempat wisata mahal, wisata ke luar negeri, menginap di hotel berbintang.

Hal tersebut sesuai dengan kutipan berikut.

*"Yah, mau gimana lagi, Bang! Memang segitulah harganya. Daripada tak selesai-selesai ini urusan."*(Madasari, 2016:32).

Menjadi seorang pamong desa yang tidak dipilih langsung oleh rakyat desa, tetapi ditetapkan oleh pejabat berwenang di kecamatan, seseorang calon pamong desa harus menyetorkan sejumlah uang yang berjumlah puluhan juta. Jabatan pamong desa hanya akan menjadi milik mereka yang memiliki uang dan mau melakukan praktik kotor suap menyuaup. Seseorang ingin menjadi seorang pegawai negeri atau pegawai pemerintah, harus mencari dan menemukan orang yang bisa dimintai tolong untuk membantu meloloskannya menjadi pegawai dengan membayar jutaan rupiah. Mengurus sertifikat tanah, seseorang harus meminta tolong kepada orang di kantor pertanahan agar sertifikat segera diproses dan diterbitkan.

*"Jadi pamong dia sekarang. Bayar 40 juta," jelas Narno.* (Madasari, 2016:60).

*...Lalu tetangga-tetangganya berkata, kok bisa biasanya jadi pegawai tanpa punya kenalan.* (Madasari, 2016:62).

*Urus sertifikat itu susah. Kalau mau bikin ya harus kenal orang dalam, harus pakai duit.*(Madasari, 2016:98).

Praktik suap menyuaup di ruang penjara juga terjadi antara narapidana dengan petugas penjara. Pelayanan dan fasilitas yang lebih istimewa bisa diperoleh seorang narapidana dengan membayar sejumlah uang agar bisa menempati kamar khusus yang lebih nyaman dan aman dengan fasilitas yang mewah lengkap dengan jasa keamanannya. Bahkan dari balik kamar penjara mewah ini seorang narapidana bisa bebas menjalankan bisnis haramnya berupa perdagangan narkoba.

*... Bu Danti ditahan di ruangan yang disediakan untuk orang-orang yang punya duit. Uang membuat nasibnya selalu lebih baik, di manapun ia berada, pikir Arimbi saat melihat bekas atasannya itu pergi.* (Madasari, 2016:173).

Kasus suap menyuaup pun merebak dalam dunia pendidikan ketika proses penerimaan siswa baru dan penerimaan

mahasiswa baru. Kasus yang timbul adalah adanya rekomendasi siswa tertentu dari kalangan pejabat, anggota dewan, atau pengusaha agar memasukkan siswa, meski nilainya tidak memenuhi syarat.

*“Benny dulu juga lulusan terbaik di ibu kota,” jelas Bu Otto Swan Deli. “Tolonglah, Prof. Kami siap untuk membantu apa saja. Papa Benny bisa membantu renovasi sekolah, membangun perpustakaan, laboratorium, asal Ben....” “Inipertama kali kami menghadapi situasiseperti ini,” kata Prof Osd tak menanggapi omongan Bu Otto. Ia sedikit kesal dengan niat Bu Otto yang mau menyogok asal Benny diterima di Stone Complex. “Belum pernah ada murid yang semula sekolah diluar negeri lalu pulang dan pindah kemari.” (Rinakit, 2013:109).*

Salah satu potensi suap adalah mengenai rekomendasi dukungan partai politik terhadap calon kepala daerah. Surat sakti berupa rekomendasi sudah seperti barang yang diperjualbelikan. Orang-orang yang berambisi untuk menjadi kepala daerah berupaya mendapat rekomendasi tersebut dengan segala cara. Mereka harus membayar ”mahar” atau suap di dalam penentuan kandidat dalam proses pencalonan sudah akrab di telinga publik. Adanya mahar politik tokoh yang paling berhak memberikan rekomendasi adalah ketua partai politik. Tahap inilah biaya politik menjadi yang paling tinggi.

*Sistem politik di Atlantis tidak mengenal partai politik. Pasangan cagub dan cawagub diajukan oleh kelompok-kelompok masyarakat di setiap wilayah. Setiap tokoh yang didekati, mengukur kemampuan diri sendiri. Kalau merasa tidak mampu, figur itu pasti menolak untuk dicalonkan. Dalam hal ini, tentu saja ada orang ambisius yang ngebet ingin jadi pejabat. Ia biasanya menyuruh antek-anteknya untuk membayar orang-orang agar mau mengusungnya. Petualang politik seperti itu juga bertebaran di Atlantis. (Rinakit, 2013:214).*

Selain ”mahar” politik, ada pula biaya survei untuk mengangkat elektabilitas seseorang atau sepasang calon kepala daerah, membayar lembaga jajak pendapat oportunistis untuk memanipulasi hasil *polling* agar

masyarakat terpengaruh. Didukung dengan iklan kampanye di media massa untuk mendongkrak dukungan massa yang berimbas pada perolehan suara.

### Pemerasan

Sudah menjadi kebiasaan pegawai pengadilan setiap kali membantu pengacara, membantu jaksa, maupun membantu hakim selalu meminta imbalan atas jasanya. Hal itu biasa dilakukan oleh seorang panitera pengadilan. Jika tidak mau memberikan imbalan atas jasanya, maka ia tak akan segera melakukan pekerjaan yang diminta segera diselesaikan. Jika pekerjaan yang diminta itu sudah selesai dikerjakannya sedangkan imbalannya belum juga diberikan, maka hal itu dianggap sebagai hutang yang harus dibayar.

*“Ya salah sendiri, sudah lama kok baru dicari.”*

*“Lha kepepetnya baru sekarang. Baru mau keluar duitnya sekarang.”*

*“Kalau tetap nggak mau keluar duit?”*

*“Ya didiamin saja” (Madasari, 2016:68).*

Pasangan suami istri yang akan melangsungkan pernikahan akan mengurus akte nikah. Mereka harus mengeluarkan uang ratusan ribu kepada aparat desa dengan alasan ”ada masalah” yang sengaja dibuat-buat berkaitan dengan penerbitan akte nikah dan untuk menyelesaikan masalah tersebut harus dengan uang agar akte nikah mereka segera diproses dan diterbitkan.

Para pembesuk agar dapat menemui narapidana yang akan dibesuknya di ruang besuk penjara harus menyerahkan sejumlah uang kepada para sipir penjara di setiap pintu yang dilewati. Tanpa menyerahkan sejumlah uang ini para pembesuk pasti akan mengalami kesulitan untuk menemui narapidana. Demikian pula bagi para narapidana yang akan menemui para pembesuk di ruang besuk penjara harus menyerahkan sejumlah uang kepada para sipir penjara di setiap pintu yang harus dilewati. Tanpa menyerahkan sejumlah uang ini para

narapidana pasti akan mengalami kesulitan untuk menemui pembesuk di ruang besuk penjara.

Tindakan pemerasan juga terjadi di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, mulai dari lingkungan masyarakat paling kecil sampai dengan lingkungan masyarakat yang luas. Fenomena itu menggambarkan dominasi bagian masyarakat yang lebih kuat terhadap yang lebih lemah. Tindakan pemerasan itu dilakukan oleh yang kuat terhadap yang lemah.

*"Kau enak-enakkan tidur sementara aku sibuk mencari buku mantra! Kau tahu siapa dirimu? Lihat namamu! Davus..., artinya budak!"* (Rinakit, 2013:99).

Calon kepala daerah sudah mempercayai orang-orang yang ditugaskan untuk mengurus masalah kampanye penggalangan dukungan. Mereka ini lebih dikenal dengan istilah "tim sukses" yang bisa melakukan pemerasan terhadap calon kepala daerah. Modus pemerasan tim sukses terhadap calon kepala daerah berkisar pada biaya kampanye yang dianggap terlalu kecil, sehingga diperlukan dana tambahan yang lebih besar. Karena calon kepala daerah lainnya mempunyai dana kampanye yang lebih mewah, sehingga tanpa tambahan dana kampanye yang diminta mustahil pencalonan kepala daerah akan berhasil. Semua itu hanya akal-akalan yang dilakukan untuk memperkaya diri dengan merugikan orang lain.

*... Dia lalu melaporkan kejadian tersebut kepada Decoctor di ibukota Atlantis. Sekaligus meminta dana tambahan dari Benny karena kampanye sudah memasuki bulan terakhir. Uang harus mulai digelontorkan untuk "membeli suara" pemilih....* (Rinakit, 2013:232).

### **Perbuatan Curang**

Dunia hukum dan pengadilan tindakan kecurangan terus terjadi sejak saat proses penangkapan, pengeledahan, dan penyitaan barang bukti kejahatan. Ketika petugas kepolisian atau KPK datang ke rumah terduga korupsi, si terduga korupsi selalu memberikan

keterangan yang berbelit-belit dan tidak benar. Mereka juga berupaya mengelabui petugas dengan cara menyembunyikan barang bukti. Jika barang bukti itu sudah ditemukan hanya kebohongan demi kebohongan yang diterima oleh petugas.

*"Ini kamar pembantu saya, Pak. Dia lagi sakit," terdengar suara Bu Danti. Ia berusaha mencegah petugas yang ingin membuka pintu kamar itu.* (Madasari, 2016:145).

Berlangsungnya sidang korupsi di KPK, kecurangan itu dilakukan oleh terduga yang selalu memberikan keterangan palsu. Kecurangan-kecurangan itu memang sengaja disusun oleh pengacara demi melepaskan diri dari jerat hukum. Sebelum proses pemeriksaan saksi atau terdakwa pengacara telah menyusun persiapan, mengajarnya membuat kisah rekayasa, dan mengajarnya bagaimana cara menjawab pertanyaan para wartawan. Selain itu para terduga itu juga saling cuci tangan dan menimpahkan kesalahan itu kepada terduga lainnya. Pokonya dengan segala cara mereka berupaya menutupi kesalahan, dan bukti-bukti itu dengan perbuatan curang.

Daerah-daerah yang akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah, banyak petualang politik yang memanfaatkan kesempatan. Figur-figur yang tidak layak dan tidak pantas tiba-tiba mengiklankan diri sebagai pahlawan. Jualannya janji manis calon kepala daerah yang bermacam-macam seperti pendidikan gratis, kesehatan gratis, minyak murah, listrik murah, pupuk murah, jalan mulus, tidak banjir, dan entahapalagi.

Kecurangan yang tidak mungkin terhindarkan serta menjadi trend paling banyak dilakukan oleh pasangan calon kepala daerah dalam pemilukada, yakni politik uang (*money politics*) dengan cara memberi uang atau bagaimanapun caranya yang dapat mempengaruhi pemilih untuk memilih pasangan calon

tersebut. Tim suksesnya juga bergerak intensif dan agresif. Permainan kotor pasti akan dilakukan, selain *money politics*, teror dengan menciptakan kerusuhan, pembakaran, perusakan, peledakan, intimidasi, fitnah, dan teror lainnya akan ditebar ke mana-mana hingga ke pelosok-pelosok daerah. Semua teror dan provokasi untuk memancing kerusuhan dan kegaduhan politik di daerah.

*“Tiga bulan lagi sudah pemilihan Agung. Tim suksesnya juga mulai bergerak intensif.” “Apa situasinya baik-baik saja?” tanya Bimbim. “Sampai sekarang situasi masih OK. Tapi mulai depan, permainan kotor pasti akan dilakukan. Money politics, intimidasi, fitnah, akan menebar ke pelosok-pelosok Tanah Kaluhuran Pasundan. Apalagi Davus...” (Rinakit, 2013:192).*

## Faktor Penyebab Korupsi

### Faktor Internal

Korupsi itu terjadi salah satu faktornya karena sifat rakus/tamak manusia. Kebanyakan pejabat negara, penentu kebijakan, dan aparat penegak hukum melakukan tindak korupsi. Ini dikarenakan dorongan sifat tamak dan serakah. Mereka masih saja rakus mengambil barang negara yang seharusnya didistribusikan untuk masyarakat, walaupun dirinya telah mendapatkan berbagai fasilitas dan gaji dari negara yang cukup besar.

Seorang yang moralnya tidak kuat cenderung mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Godaan itu bisa berasal dari atasan, teman setingkat, bawahannya, atau pihak yang lain yang memberi kesempatan untuk berniat korupsi. Pembentukan moral yang tidak sempurna dari keluarga bisa menjadi faktor utama dalam hal ini.

*Arimbi mengangguk-angguk, tak bertanya lagi. Dalam hati ia menghitung, apa saja yang bisa dilakukannya dengan uang sepuluh miliar. Tak ada yang tak bisa dibeli dengan uang sebanyak itu. Bahkan masih sisa untuk simpanan anak cucu. Kalaupun sekarang ketahuan korupsi, tinggal nyogok dua miliar, beres semua. Masih*

*tetap sisa banyak, pikir Arimbi. (Madasari, 2016:139—140).*

Gaya hidup konsumtif turut memicu individu melakukan tindak korupsi. Perilaku konsumtif bila tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai akan membuka peluang seseorang untuk melakukan tindakan korupsi untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak lagi sebagai bentuk pemenuhan keinginan.

*“Kata Profesor Chithra Olo,” Pada dasarnya, sifat alamiah semua orang adalah konsumtif dan ingin lebih. Jadi uang adalah pilihan pertama. (Rinakit, 2013:240).*

Keluarga juga dapat memberikan pengaruh yang kuat terhadap terjadinya perbuatan korupsi, misalnya karena dorongan dari orang tua, suami, istri, atau anggota keluarga lainnya.

*“Ya sudah siap seratus juta, Mbak. Bisa diambil kapan saja. Yang penting anak saya bisa jadi pegawai di pengadilan.”*

*Arimbi tak menjawab apa-apa. Kenyataannya di kantor dia tak punya kenalan siapa-siapa selain sesama juru ketik dan Bu Danti. Seratus juta? Arimbi memang tak pernah mendengar hampir semua pegawai di kantornya diterima karena *nyogok* atau punya saudara. Tapi dia tak sepenuhnya percaya. Buktinya dia diterima tanpa mengeluarkan apa-apa.*

*“Ya nggak ada salahnya diusahakan, Mbi. Dicoba dulu,” bapaknya berkata pelan. (Madasari, 2016: 63).*

### Faktor Eksternal

Sikap masyarakat juga dapat menyuburkan tindakan korupsi. Nilai-nilai yang dianut masyarakat, seperti pergaulan yang menghargai seseorang yang kaya, dan tidak pelit dengan kekayaannya, senang memberikan hadiah. Masyarakat sering kali senang ketika ada yang memberi apalagi nominalnya besar atau berbentuk barang berharga, tanpa memikirkan dari mana sumber kekayaannya atau barang/hadiah yang diberikannya.

Faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Selain rendahnya gaji atau pendapatan, banyak aspek ekonomi lain yang menjadi

penyebab terjadinya korupsi, di antaranya adalah kekuasaan pemerintah yang dibarengi dengan faktor kesempatan bagi pegawai pemerintah untuk memenuhi kekayaan mereka dan kroninya.

*Kepada orang tuanya di kampung, Arimbi mengirim uang 500.000, lebih besar dari biasanya yang hanya 300.000. Kepada mereka, melalui telepon, Arimbi bilang ada tambahan rezeki. Bapaknya tak henti-henti mengucap syukur. Katanya mereka akan segeramenyembelih ayam, selamatan kecil-kecilan, agar makin mendapat berkah di hari-hari selanjutnya. Arimbi dengan semangat mengiyakannya. Dalam kepalanya terbayang makin banyak pengacara yang mendatangnya, memberikan bagiannya, yang bukan hanya sekedar selebar atau dua lembar ratusan ribu.* (Madasari, 2016: 108).

Politik merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Perilaku curang (politik uang) pada pemilihan anggota legislatif ataupun pejabat-pejabat eksekutif, dana ilegal untuk pembiayaan kampanye, penyelesaian konflik parlemen melalui cara-cara ilegal dan teknik lobi yang menyimpang.

Masih ditemukan aturan-aturan yang diskriminatif, berpihak, dan tidak adil, rumusan yang tidak jelas sehingga menjadi multitafsir, kontradiksi dan overlapping dengan peraturan lain (baik yang sederajat maupun lebih tinggi). Penegakan hukum juga masih menjadi masalah. Masyarakat umum sudah mulai luntur kepercayaan kepada aparat penegak hukum, karena praktik-praktik penegakan hukum yang masih diskriminatif, dan tidak jelas tujuannya.

Organisasi yang menjadi korban korupsi atau dimana korupsi terjadi biasanya organisasi memberi andil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan untuk melakukan korupsi. Aspek-spek terjadinya korupsi dari sudut pandang organisasi meliputi kurang adanya teladan dari pemimpin, tidak adanya kultur organisasi yang benar, sistem akuntabilitas dalam instansi kurang

memadai, dan manajemen cenderung menutupi didalam organisasinya.

*“Maharaja Dalu membaca surat dari kakaknya. Surat pertama yang diterima empat bulan lalu dia anggap tidak pernah ada. Surat itu menceritakan keadaan rakyat Atlantis yang dirongrong korupsi pejabat kerajaan, meluasnya kemiskinan, dan merebaknya tawuran serta kekerasan dalam masyarakat. Menurut para menteri dan orang-orang kepercayaannya, semua yang diceritakan Profesor Osd tak lebih dari sekedar kabar bohong. Rakyat Atlantis tetap aman dan makmur. Terbukti dari pertumbuhan ekonomi yang terus naik.* (Rinakit, 2013:42).

## SIMPULAN

Bentuk-bentuk korupsi yang terdapat dalam novel 86 karya Okky Madasari dan novel Slank 5 Hero dari Atlantis karya Sukardi Rinakit adalah suap menyuap, pemerasan, dan perbuatan curang. Faktor penyebab korupsi yang terdapat dalam novel 86 karya Okky Madasari dan novel Slank 5 Hero dari Atlantis karya Sukardi Rinakit meliputi faktor internal dan faktor eksternal.

## DAFTAR RUJUKAN

- Kartono, Kartini. 1991. *Patologi Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2006. *Memahami untuk Memasmi: Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: KPK.
- Kurniadi, Yusuf. 2011. *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi: Dampak Masif Korupsi*. Jakarta: Dedikbud RI, Dirjend. PT, Bagian Hukum Kepegawaian.
- Madasari, Okky. 2011. *Sebuah Novel 86*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mahsun. 2012. *Metode Penelitian Bahasa: Tahapan Strategi, Metode, dan Tekniknya*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Nubowo, Andar, Rosita Susi Aryanti. 2004. *Membangun Gerakan Anti Korupsi dalam Prespektif Pendidikan*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pendidikan UMY.
- Pope, Jeremy. 2003. *Strategi Memberantas Korupsi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Ratna, Kutha Nyoman. 2010. *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rinakit, Sukardi. 2013. *Slank 5 Hero dari Atlantis*. Yogyakarta: Galang Pustaka.
- Rukmini, Mien. 2009. *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*. Bandung: Alumni.
- Salama, Nadiatus. 2010. *Fenomena Korupsi Indonesia (Kajian Mengenai Motif dan Proses Terjadinya Korupsi)*. Semarang: Pusat Penelitian IAIN Walisongo.
- Sanjaya, Wina. 2011. *Penelitian Tindakan Kelas*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Sarjono, Agus R. 2012. "Perkara Korupsi dalam Sastra Indonesia" dalam *Jurnal Kritik: Teori dan Kajian Sastra*. Jakarta: The Intercultural Institute.
- Siswantoro. 2005. *Metode Penelitian Sastra. Pendekatan, Teori, Metode, Teknik, dan Kiat*. Yogyakarta: Unit Penerbitan Sastra Asia Barat Fakultas Ilmu Budaya UGM.
- Sudjiman, Panuti. 1998. *Bunga Rampai Stilistika*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Sukardi. 2010. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Taringan, Henry Guntur. 1995. *Prinsip-prinsip Dasar Sastra*. Bandung: Angkasa.
- Wijayanto. 2009. "Memahami Korupsi" dalam *Korupsi Mengorupsi Indonesia*. Jakarta: Kompas Gramedia.